

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Dan Tugas Bank Indonesia

Bank sentral adalah bank yang ditugasi untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan yang diperlukan, baik untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi, sehingga roda perekonomian dapat berjalan lancar. Oleh karena itu Bank Sentral pada umumnya mempunyai dua peranan, yaitu sebagai salah satu unsur penguasa moneter yang berwenang melaksanakan kebijakan moneter, dan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan sistem moneter yang ada dalam satu masyarakat atau negara.⁶

Di Indonesia bank yang diberi wewenang sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia (UU No.13 tahun 1968, pasal 1 ayat 1). Bersama dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia berfungsi sebagai penguasa moneter. Dalam hal ini pemerintah pusat melakukan fungsi yang terutama berhubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan mencari pinjaman dari negara-negara lain, misalnya melalui Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). Bersama dengan bank-bank umum, penguasa moneter merupakan unsur-unsur sistem moneter yang ada di Indonesia.^{7¹}

⁷ Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.69. ⁷ Ibid.

Tugas pokok Bank Indonesia tercantum pada pasal 7 UU No.13 tahun 1968 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal:

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas

kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Tugas pokok tersebut dirinci lagi menjadi:

1. Sebagai Bank Sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mngedarkan uang kertas dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah.
2. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia adalah Bank Pusat bagi bank bank lainnya, di mana dalam urusan perbankan dan perkreditan Bank Indonesia bertugas antara lain:
 - a. Membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu-lintas pembayaran giral dan menyelenggrakan “clearing” antar bank.
 - b. Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara.
 - c. Menetapkan tingkat dan struktur bunga.
 - d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.
 - e. Menjaga stabilitas sistem keuangan.
 - f. Menjalankan fungsi sebagai “Lender of thr last resort”^{8 2}

⁸*Ibid.*, h.71.

3. Bank Indonesia juga:

- a. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
- b. Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah.
- c. Memberikan kredit kepada pemerintah dalam bentuk rekening koran.
- d. Membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara.

4. Dalam hubungan internasional, Bank Indonesia bertugas antara lain:

- a. Sebagai penyusun rencana devisa dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter.
- b. Mengawasi, mengurus dan menyelenggarakan tata usaha cara dengan emas dan devisa negara.
- c. Mengawasi dan mengkoordinir pembayaran internasional.

5. Bank Sentral sebagai pelaksana kebijaksanaan moneter yang disusun oleh Dewan Moneter. Dalam hal ini Dewan Moneter bertugas membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kesetabilan moneter, kesempatan kerja penuh dan peningkatan taraf hidup rakyat. Dewan Moneter ini adalah terdiri atas 3 anggota, yakni:

- a. Menteri Keuangan Sebagai ketua;
- b. Menteri yang membidangi perekonomian;
- c. Gubernur Bank Indonesia.⁹

B. Peran Dan Tujuan Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah bank sentral (central bank). Bank sentral ditiap negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir di tiap provinsi. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas. Tugas bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI).¹⁰

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bahkan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Tugas berikutnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kesetabilan nilai rupiah. Disamping itu, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditngani oleh Bank Indonesia, seperti menerima pinjaman luar negri.^{11 3}

Bank Sentral juga merupakan lembaga yang memiliki peranan strategis baik dalam perekonomian domestik suatu negara maupun dalam kaitannya dengan ⁴

⁹Ibid., h.72.

¹⁰ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h.234.

¹¹Ibid., h. 235.

perekonomian manca negara. Umumnya Bank Sentral diberikan mandat berupa tanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Melalui kebijakan moneter, lembaga ini berusaha untuk menjaga stabilitas harga, stabilitas sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan (macroprudential). Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). Sebagai Bank Sentral, BI diberikan mandat untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas harga yang salah satunya tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil (UU Nomor: 23/1999 Tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor: 3/2004 tentang BI). Artinya, UU ini mengamanahkan kepada BI untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan moneter yaitu tingkat inflasi yang rendah dan stabil atau pada tingkat yang optimal bagi perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI bebas menentukan penggunaan instrumen-instrumen dalam operasi kebijakan moneter, kebebasan inilah yang dinamakan independensi instrumen.¹²

Bank Sentral berusaha menstabilkan perekonomian suatu negara melalui operasi kebijakan moneter, misalnya pada saat perekonomian AS mengalami stagnasi yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi seperti yang terjadi di tahun 1990-an, maka The Fed menempuh kebijakan moneter yang bersifat stimulatif. Untuk kebijakan tersebut, instrumen kebijakan yang dipergunakan adalah menyediakan kredit bank yang lebih besar untuk masyarakat. Kebijakan tersebut mengakibatkan turunnya tingkat bunga dan meningkatnya jumlah uang beredar yang selanjutnya mendorong permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan⁵

¹² Natsir, *Ekonomi Moneter & Kebanksentralan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 77

penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Jika terjadi sebaliknya, perekonomian dalam keadaan permintaan yang berlebihan dan terjadi kenaikan tingkat harga umum (inflasi), maka bank sentral (The fed) akan mengambil kebijakan untuk menekan pengeluaran agregat dengan cara menerapkan instrumen kebijakan berupa pengurangan jumlah kredit dan jumlah uang beredar serta mendorong meningkatnya suku bunga, seperti yang dilakukan pada tahun 1994 ketika perekonomian AS mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan tekanan inflasi terasa semakin berat, The Fed meningkatkan suku dan mengerem pertumbuhan kredit bank dan jumlah uang beredar.¹³

Tujuan Bank Indonesia seperti terutang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kesetabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas. Salah satu akibat ketidakstabilan nilai rupiah adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah sangatlah penting.

Adapun maksud dari kesetabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah:

1. Kesetabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.⁶

¹³*Ibid.*, h. 78

2. Kesetabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar kesetabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan tugas di atas pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia.¹⁴

C. Sejarah Dan Kebijakan Sistem Nilai Tukar Rupiah

Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipastikan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Penggunaan suatu mata uang, semula hanyalah didasarkan pada kesepakatan dari masyarakat yang mempergunakan. Namun, dalam masyarakat modern penggunaan suatu mata uang pada umumnya diatur dengan undang-undang. Misalnya, Rupiah merupakan mata uang yang berlaku di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun ⁷

¹⁴Kasmir, *Perbankan*, h. 236.

1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004 tentang

Bank Indonesia.¹⁵

Dalam perekonomian terbuka, penggunaan uang dalam memperlancar transaksi tidak terbatas hanya dilakukan antar penduduk, tetapi juga dapat dilakukan antar penduduk suatu negara dengan negara lain dengan menggunakan mata uang yang disepakati. Penggunaan uang dengan penduduk negara lain tersebut umumnya dilakukan untuk transaksi pembayaran impor barang-barang dan jasa ke penduduk diluar negeri ataupun penerimaan hasil ekspor barang jasa dari luar negeri.

Dalam melakukan transaksi dengan penduduk negara lain, masing-masing negara tentunya akan menghadapi permasalahan mengenai alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi tersebut, misalnya mata uang yang digunakan apakah mata uang asing atau mata uang masing-masing negara serta berapa besar nilai suatu transaksi ditetapkan dalam mata uang asing. Semua permasalahan yang berkaitan dengan mata uang suatu negara dengan negara lainnya tersebut biasanya dikenal dengan permasalahan nilai tukar.

Dalam sejarah sistem moneter internasional, penentuan dan sistem nilai tukar suatu negara mempunyai evaluasi yang panjang. Pada awal sistem moneter internasional modern pada abad ke-19, beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan mengacu kepada standar emas (Gold Standard). Sistem ini juga mengalami pasang surut sehingga muncul sistem nilai tukar dengan mengacu ⁸

¹⁵ Iskandar Simorangkir, *Sistem dan kebijakan Nilai Tukar* (Jakarta: Rajawali, 2004), h. 1.

pada kesepakatan Bretton Woods. Sistem ini juga tidak mampu bertahan lama sehingga sejak tahun 1970-an, setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sistem nilai tukar yang digunakan. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sistem nilai tukar yang digunakan suatu negara tidak hanya terbatas pada sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate), tetapi juga sistem nilai tukar mengambang (Flexible exchange rate) atau variasi dari kedua sistem tersebut. Selain itu, perkembangan terakhir yang tidak kalah menariknya adalah pembentukan mata uang bersama dari anggota European Monetary Union pada tahun 1999 dan diberlakukan penuh pada tahun 2002.¹⁶

Dalam era globalisasi perekonomian dunia, pergerakan uang antar negara tidak mengenal batas lagi. Uang bergerak dengan cepat dari suatu negara ke negara lain dan cenderung menuju ke tempat yang menghasilkan pendapatan terbesar. Selain itu, uang juga diperdagangkan sebagai barang sehingga mata uang suatu negara cukup rentan terhadap kegiatan spekulasi. Dengan perkembangan global tersebut maka negara-negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap atau dengan variasinya sangat rentan terhadap arus balik modal dan kegiatan spekulasi. Krisis nilai tukar yang terjadi di negara-negara Amerika Latin pada awal 1990-an dan negara Asia tahun 1997/1998 terutama diakibatkan dari kedua faktor tersebut.

Data empiris menunjukkan bahwa krisis nilai tukar berpengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara, seperti yang telah dirasakan oleh beberapa negara Asia pada tahun 1997/98.⁹

¹⁶ *Ibid.*, h. 2.

Krisis nilai tukar ini tidak hanya mengakibatkan harga-harga membumbung tinggi, tetapi juga mengakibatkan kontraksi perekonomian yang cukup dalam. Melemahnya nilai tukar mengakibatkan barang-barang impor, seperti bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi lebih mahal dan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga barang di dalam negeri. Selain itu, melemahnya nilai tukar mengakibatkan semakin besarnya kewajiban hutang luar negeri perusahaan-perusahaan sehingga neraca perusahaan dan bank-bank memburuk.

Sebagaimana diuraikan diatas, krisis nilai tukar dapat berdampak buruk terhadap ekonomi sehingga kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar merupakan kebijakan ekonomi yang penting pada beberapa negara. Misalnya, di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2003, kepada Bank Indonesia diberi tugas untuk menjaga dan memelihara kesetabilan nilai Rupiah. Dalam pengertian tersebut, Bank Indonesia tidak hanya menjaga dan memelihara kesetabilan nilai Rupiah agar harga-harga barang dan jasa (laju inflasi) dapat terkendali, tetapi juga untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah mata uang asing.¹⁷

D. Pengertian Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.¹⁰

¹⁷ *Ibid.*, h. 3

Nilai tukar mata uang didefinisikan sebagai harga dari satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar, yaitu (1) fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap; (2) managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali; dan (3) floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang.¹⁸

Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok Rp. 8.000,- per dolar. Pada nilai tukar ini Bank Sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Apabila nilai tukar tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan.

Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi dipasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan sebaliknya nilai tukar mata uang domestik akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan valuta asing.¹⁹

Bank sentral dapat saja melakukan intervensi di pasar valuta asing, yaitu dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan atau membeli devisa apabila terjadi kelebihan penawaran untuk menghindari gejolak nilai tukar yang¹¹

¹⁸ Ferry Syarifuddin, *Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia* (Jakarta: Bibliografi, 2015), h.6. ¹⁹*Ibid.*, h.7.

berlebihan di pasar. Akan tetapi, intervensi dimaksud tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tertentu atau dalam kisaran tertentu.

Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada diantara kedua sistem nilai tukar diatas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut *intervention band* atau batas pita intervensi. Nilai tukar akan ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada didalam batas kisaran pita intervensi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak kembali kedalam pita intervensi.²⁰

Setiap sistem nilai tukar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pemilihan sistem yang diterapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan, khususnya besarnya cadangan devisa yang dimiliki, keterbukaan ekonomi, sistem devisa yang dianut (bebas, semi terkontrol atau terkontrol), dan besarnya volume pasar valuta asing domestik. Sistem nilai tukar tetap mempunyai kelebihan karena adanya kepastian nilai tukar bagi pasar. Akan tetapi, sistem ini membutuhkan cadangan devisa yang besar karena keharusan bank sentral untuk mempertahankan nilai tukar pada level yang ditetapkan. Selain itu, sistem ini dapat mendorong kecenderungan dunia usaha untuk tidak melakukan hedging (perlindungan nilai) valuta asingnya terhadap risiko perubahan nilai tukar. Sistem ini umumnya diterapkan di neagara yang¹²

²⁰ *Ibid.*, h. 8.

mempunyai cadangan devisa besar, dengan sistem devisa yang masih relatif terkontrol.

Sistem tukar mengambang mempunyai kelebihan dengan tidak perlunya cadangan devisa yang besar, karena bank sentral tidak harus mempertahankan nilai tukar pada suatu level tertentu. Akan tetapi, nilai tukar yang terlalu berfluktuasi dapat menambah ketidakpastian bagi dunia usaha. Sistem ini umumnya diterapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa relatif kecil sementara sistem devisa yang dianut cenderung bebas.

Pergerakan nilai tukar dipasar dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non-fundamental. Faktor fundamental tercermin dari variabel-variabel ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan perkembangan ekspor impor. Sementara itu, faktor non-fundamental antara lain, berupa sentimen pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam memperhitungkan informasi, rumor, atau perkembangan lain dalam menentukan nilai tukar sehari-hari ¹³

²¹*Ibid.*, h.8.